

RAHASIA



MODUL 1 PENILAIAN DOKUMEN

**Nama
Penilai**

:

**Provinsi
Dinilai**

:

**Kabupaten
/Kota
Dinilai**

:

Digital evaluation system is available

Petunjuk Penilaian

1. Penilaian dikelompokkan dalam 5 kriteria dan 24 indikator.
2. Masing-masing indikator terdiri dari beberapa item penilaian.
3. Setiap item penilaian terdiri dari dua pilihan kategori yang bernilai "0" atau "1".
4. Tim penilai menentukan skor masing-masing pada item penilaian.
5. Nilai untuk masing-masing indikator adalah akumulasi dari skor item penilaian pada indikator yang bersesuaian, dengan rumusan:

$$\text{Nilai indikator (i)} = \frac{\text{Jumlah skor seluruh item pada indikator (i)}}{\text{Jumlah item pada indikator (i)}} \times 10$$

- ❖ Dengan demikian, setiap indikator memiliki nilai minimum "0" dan maksimum "10".
 - ❖ Pengisian nilai untuk setiap indikator dapat mengacu pada panduan pemberian nilai yang terdapat di bagian akhir setiap indikator.
 - ❖ Pemberian nilai dilakukan dengan menuliskan nilai yang bersesuaian dengan total skor ke dalam kotak nilai yang berada pada pojok kanan atas.
6. Total skor suatu daerah merupakan akumulasi dari seluruh indikator dengan memperhatikan bobot masing-masing indikator

$$\text{Total skor} = \sum_{i=1}^{24} \text{Nilai indikator (i)} \times \text{bobot indikator (i)}$$

7. Setiap daerah dinilai oleh 3 orang penilai teknis.
8. Nilai akhir penilaian perencanaan dan pelaksanaan RKPD adalah nilai tengah dari 3 tim penilai teknis.
9. Penilaian aspek pencapaian pembangunan menggunakan data terakhir yang telah disediakan oleh Sekretariat PPD.



Penjelasan Kriteria dan Indikator

Kriteria	Indikator	Bobot
Aspek Pencapaian Pembangunan (40%)		
Pencapaian (40%)	1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PDRB per Kapita	5,00%
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Penganggur	6,00%
	3. Kemiskinan	8,00%
	4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	6,00%
	5. Ketimpangan	5,00%
	6. Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan	5,00%
	7. Transparansi dan Akuntabilitas	5,00%
Aspek Kualitas Dokumen RKPD (40%)		
Keterkaitan (5%)	8. Tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2023 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD/RPD	2,50%
	9. Tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2023	2,50%
Konsistensi (11,25%)	10. Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2021 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2023	3,75%
	11. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2023	2,50%
	12. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 dengan program prioritas daerah	2,50%
	13. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2023 dengan pagu anggaran	2,50%
Kelengkapan dan Kedalaman (23,75%)	14. Tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan	2,50%
	15. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2023	2,50%
	16. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan prioritas pada PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2023	2,50%
	17. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan prioritas pada PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2023	2,50%
	18. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan Prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2023	2,50%
	19. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan Prioritas pada PN Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2023	2,50%
	20. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan Prioritas pada PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2023	2,50%
	21. Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPD 2023 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)	2,50%
	22. Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas	3,75%
Aspek Inovasi (20%)		
Inovasi (20%)	23. Kelengkapan dokumen inovasi daerah	5,00%
	24. Kedalaman inovasi daerah	15,00%



❖ Kriteria Pencapaian (40%)

Nilai 1

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PDRB per Kapita

Bobot 5,00%

No.	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan target daerah	Pertumbuhan ekonomi lebih buruk dari target daerah atau tidak ada target daerah	Pertumbuhan ekonomi sama atau lebih baik dari target daerah	
2.	Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan ekonomi daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan ekonomi daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
3.	Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dengan capaian nasional	Pertumbuhan ekonomi daerah lebih buruk dari capaian nasional	Pertumbuhan ekonomi daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
4.	Tingkat perubahan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan pertumbuhan ekonomi < 0	Perubahan pertumbuhan ekonomi ≥ 0	
5.	Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian wilayah yang setara sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan pertumbuhan ekonomi daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Perubahan pertumbuhan ekonomi daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
6.	Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan pertumbuhan ekonomi daerah lebih buruk dari capaian nasional	Perubahan pertumbuhan ekonomi daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
7.	Perbandingan PDRB per kapita (ADHK) dengan target daerah	PDRB per kapita (ADHK) lebih buruk dari target daerah atau tidak ada target daerah	PDRB per kapita (ADHK) sama atau lebih baik dari target daerah	
8.	Perbandingan PDRB per kapita (ADHB) dengan target daerah	PDRB per kapita (ADHB) lebih buruk dari target daerah atau tidak ada target daerah	PDRB per kapita (ADHB) sama atau lebih baik dari target daerah	
9.	Perbandingan pertumbuhan PDRB per kapita ADHK dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK daerah sama atau lebih baik dari wilayah yang setara	
10.	Perbandingan rasio perubahan TPT dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian nasional	Rasio perubahan TPT dengan pertumbuhan ekonomi daerah lebih buruk dari rata-rata capaian nasional	Rasio perubahan TPT dengan pertumbuhan ekonomi daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian nasional	
11.	Perbandingan rasio perubahan persentase penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian nasional	Rasio perubahan persentase penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi daerah lebih buruk dari rata-rata capaian nasional	Rasio perubahan persentase penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian nasional	
12.	Perbandingan rasio perubahan rasio gini dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan rata-rata capaian nasional	Rasio perubahan rasio gini dengan pertumbuhan ekonomi daerah lebih buruk dari rata-rata capaian nasional	Rasio perubahan rasio gini dengan pertumbuhan ekonomi daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian nasional	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nilai	0	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2	5	5,8	6,7	7,5	8,3	9,2	10



❖ Kriteria Pencapaian (40%)

Nilai 2

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Penganggur

Bobot 6,0%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Perbandingan TPT dengan target daerah	TPT lebih buruk dari target daerah atau tidak ada target daerah	TPT sama atau lebih baik dari target daerah	
2.	Tingkat perubahan TPT	Tingkat perubahan TPT ≥ 0	Tingkat perubahan TPT < 0	
3.	Perbandingan perubahan TPT daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Perubahan TPT daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Perubahan TPT daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
4.	Perbandingan perubahan pencapaian TPT daerah dengan nasional	Perubahan TPT daerah lebih buruk dari nasional	Perubahan TPT daerah sama atau lebih baik dari nasional	
5.	Tingkat perubahan TPT sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Tingkat perubahan TPT > 0	Tingkat perubahan TPT ≤ 0	
6.	Perbandingan perubahan TPT daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan TPT daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Perubahan TPT daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
7.	Perbandingan perubahan TPT daerah dengan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan TPT daerah lebih buruk dari capaian nasional	Perubahan TPT daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
8.	Tingkat pertumbuhan jumlah penganggur	Pertumbuhan jumlah penganggur > 0	Pertumbuhan jumlah penganggur ≤ 0	
9.	Perbandingan pertumbuhan jumlah penganggur daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan jumlah penganggur daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan jumlah penganggur daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
10.	Perbandingan pertumbuhan jumlah penganggur daerah dengan nasional	Pertumbuhan jumlah penganggur daerah lebih buruk dari nasional	Pertumbuhan jumlah penganggur daerah sama atau lebih baik dari nasional	
11.	Tingkat perubahan jumlah penganggur sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Tingkat perubahan jumlah penganggur > 0	Tingkat perubahan jumlah penganggur ≤ 0	
12.	Perbandingan perubahan jumlah penganggur daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan jumlah penganggur daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan jumlah penganggur daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	
13.	Perbandingan perubahan jumlah penganggur daerah dengan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan jumlah penganggur daerah lebih buruk dari capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan jumlah penganggur daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nilai	0	0,8	1,5	2,3	3,1	3,8	4,6	5,4	6,2	6,9	7,7	8,5	9,2	10

❖ Kriteria Pencapaian (40%)

Nilai 3

3. Kemiskinan

Bobot 8,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
A. Persentase Kemiskinan				
1	Perbandingan persentase penduduk miskin dengan target daerah	Persentase penduduk miskin lebih buruk dari target daerah atau tidak ada target daerah	Persentase penduduk miskin sama atau lebih baik dari target daerah	
2	Tingkat perubahan persentase penduduk miskin	Tingkat perubahan persentase penduduk miskin > 0	Tingkat perubahan persentase penduduk miskin ≤ 0	
3	Perbandingan perubahan persentase penduduk miskin daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Perubahan persentase penduduk miskin daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Perubahan persentase penduduk miskin daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
4	Perbandingan perubahan pencapaian persentase penduduk miskin daerah dengan rata-rata capaian nasional	Perubahan persentase penduduk miskin daerah lebih buruk dari rata-rata capaian nasional	Perubahan persentase penduduk miskin daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian nasional	
5	Tingkat perubahan persentase penduduk miskin sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Tingkat perubahan persentase penduduk miskin > 0	Tingkat perubahan persentase penduduk miskin ≤ 0	
6	Perbandingan perubahan persentase penduduk miskin daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan persentase penduduk miskin daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Perubahan persentase penduduk miskin daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
7	Perbandingan perubahan persentase penduduk miskin daerah dengan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan persentase penduduk miskin daerah lebih buruk dari capaian nasional	Perubahan persentase penduduk miskin daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
B. Indeks Kedalaman Kemiskinan				
1	Tingkat perubahan indeks kedalaman kemiskinan	Tingkat perubahan indeks kedalaman kemiskinan > 0	Tingkat perubahan indeks kedalaman kemiskinan ≤ 0	
2	Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Perubahan indeks kedalaman kemiskinan daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Perubahan indeks kedalaman kemiskinan daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
3	Perbandingan perubahan pencapaian indeks kedalaman kemiskinan daerah dengan rata-rata capaian nasional	Perubahan indeks kedalaman kemiskinan daerah lebih buruk dari rata-rata capaian nasional	Perubahan indeks kedalaman kemiskinan daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian nasional	
C. Jumlah Penduduk Miskin				
1	Perbandingan jumlah penduduk miskin dengan target daerah	Jumlah penduduk miskin lebih buruk dari target daerah atau tidak ada target daerah	Jumlah penduduk miskin sama atau lebih baik dari target daerah	
2	Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin	Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin > 0	Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk miskin ≤ 0	
3	Perbandingan pertumbuhan jumlah penduduk miskin daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan jumlah penduduk miskin daerah lebih buruk dari	Pertumbuhan jumlah penduduk miskin daerah sama atau lebih	



No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
		rata-rata capaian wilayah yang setara	baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
4	Perbandingan pertumbuhan jumlah penduduk miskin daerah dengan rata-rata capaian nasional	Pertumbuhan jumlah penduduk miskin daerah lebih buruk dari rata-rata capaian nasional	Pertumbuhan jumlah penduduk miskin daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian nasional	
5	Tingkat perubahan jumlah penduduk miskin sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Tingkat perubahan jumlah penduduk > 0	Tingkat perubahan jumlah penduduk miskin ≤ 0	
6	Perbandingan perubahan jumlah penduduk miskin daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan jumlah penduduk miskin daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Perubahan jumlah penduduk miskin daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
7	Perbandingan perubahan jumlah penduduk miskin daerah dengan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan jumlah penduduk miskin daerah lebih buruk dari capaian nasional	Perubahan jumlah penduduk miskin daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nilai	0	0,6	1,2	1,8	2,4	2,9	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,5	7,1	7,6	8,2	8,8	9,4	10



❖ Kriteria Pencapaian (40%)

Nilai 4

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Bobot 6,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
1	Perbandingan IPM dengan target daerah	IPM lebih buruk dari target daerah atau tidak ada target daerah	IPM sama atau lebih baik dari target daerah	
2	Perbandingan pertumbuhan IPM daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan IPM daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan IPM daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
3	Perbandingan pertumbuhan IPM daerah dengan rata-rata capaian nasional	Pertumbuhan IPM daerah lebih buruk dari rata-rata capaian nasional	Pertumbuhan IPM daerah sama atau lebih baik dari rata-rata nasional	
4	Perbandingan IPM sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan IPM < 0	Perubahan IPM ≥ 0	
5	Perbandingan perubahan IPM daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan IPM daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Perubahan IPM daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
6	Perbandingan perubahan IPM daerah dengan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan IPM daerah lebih buruk dari capaian nasional	Perubahan IPM daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
B. Angka Harapan Hidup (AHH)				
1	Perbandingan AHH dengan target daerah	AHH lebih buruk dari target daerah atau tidak ada target daerah	AHH sama atau lebih baik dari target daerah	
2	Perbandingan pertumbuhan AHH daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan AHH daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan AHH daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
3	Perbandingan pertumbuhan AHH daerah dengan rata-rata capaian nasional	Pertumbuhan AHH daerah lebih buruk dari rata-rata capaian nasional	Pertumbuhan AHH daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian nasional	
C. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)				
1	Perbandingan RLS dengan target daerah	RLS lebih buruk dari target daerah atau tidak ada target daerah	RLS sama atau lebih baik dari target daerah	
2	Perbandingan pertumbuhan RLS daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan RLS daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan RLS daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
3	Perbandingan pertumbuhan RLS daerah dengan rata-rata capaian nasional	Pertumbuhan RLS daerah lebih buruk dari rata-rata capaian nasional	Pertumbuhan RLS daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian nasional	



No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
D. Harapan Lama Sekolah (HLS)				
1	Perbandingan HLS dengan target daerah	HLS lebih buruk dari target daerah atau tidak ada target daerah	HLS sama atau lebih baik dari target daerah	
2	Perbandingan pertumbuhan HLS daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan HLS daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan HLS daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
3	Perbandingan pertumbuhan HLS daerah dengan rata-rata capaian nasional	Pertumbuhan HLS daerah lebih buruk dari rata-rata capaian nasional	Pertumbuhan HLS daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian nasional	
E. Pengeluaran per Kapita (Disesuaikan)				
1	Perbandingan pengeluaran per kapita dengan target daerah	Pengeluaran per kapita lebih buruk dari target daerah atau tidak ada target daerah	Pengeluaran per kapita sama atau lebih baik dari target	
2	Perbandingan pertumbuhan pengeluaran per kapita daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan pengeluaran daerah per kapita lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Pertumbuhan pengeluaran daerah per kapita sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
3	Perbandingan pertumbuhan pengeluaran per kapita daerah dengan nasional	Pertumbuhan pengeluaran daerah per kapita lebih buruk dari nasional	Pertumbuhan pengeluaran daerah per kapita sama atau lebih baik dari nasional	
4	Perbandingan perubahan pengeluaran per kapita (disesuaikan) sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Pertumbuhan pengeluaran per kapita (disesuaikan) < 0	Pertumbuhan pengeluaran per kapita (disesuaikan) ≥ 0	
5	Perbandingan perubahan pengeluaran per kapita daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan pengeluaran per kapita lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Perubahan pengeluaran per kapita daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
6	Perbandingan perubahan pengeluaran per kapita daerah dengan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan pengeluaran per kapita daerah lebih buruk dari capaian nasional	Perubahan pengeluaran per kapita daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai	0	0,5	1	1,4	1,9	2,4	2,9	3,3	3,8	4,3	4,8

Jumlah Skor	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Nilai	5,2	5,7	6,2	6,7	7,1	7,6	8,1	8,6	9	9,5	10



❖ Kriteria Pencapaian (40%)

Nilai 5

5. Ketimpangan

Bobot 5,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor Per Item		Skor
		0	1	
1.	Perbandingan rasio gini dengan target daerah	Rasio gini lebih buruk dari target daerah atau tidak ada target daerah	Rasio gini sama atau lebih baik dari target daerah	
2.	Tingkat perubahan rasio gini	Tingkat perubahan rasio gini ≥ 0	Tingkat perubahan rasio gini < 0	
3.	Perbandingan perubahan rasio gini daerah dengan wilayah yang setara	Perubahan rasio gini daerah lebih buruk dari wilayah yang setara	Perubahan rasio gini daerah sama atau lebih baik dari wilayah yang setara	
4.	Perbandingan perubahan rasio gini daerah dengan nasional	Perubahan rasio gini daerah lebih buruk dari nasional	Perubahan rasio gini daerah sama atau lebih baik dari nasional	
5.	Perbandingan perubahan rasio gini sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan rasio gini > 0	Perubahan rasio gini ≤ 0	
6.	Perbandingan perubahan rasio gini daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan rasio gini daerah lebih buruk dari rata-rata capaian wilayah yang setara	Perubahan rasio gini daerah sama atau lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara	
7.	Perbandingan perubahan rasio gini daerah dengan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini	Perubahan rasio gini daerah lebih buruk dari capaian nasional	Perubahan rasio gini daerah sama atau lebih baik dari capaian nasional	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7
Nilai	0	1,4	2,9	4,3	5,7	7,1	8,6	10



❖ Kriteria Pencapaian (40%)

6. Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan

Nilai 6

Bobot 5,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor Per Item		Skor
		0	1	
1.	Ketepatan waktu dalam pengesahan APBD T.A. 2023	Tidak tepat waktu (setelah 31 Desember 2022)	Tepat waktu (sebelum 31 Desember 2022)*	
2.	Penggunaan e-procurement	Belum menggunakan	Sudah menggunakan	
3.	Penggunaan e-budgetting	Belum menggunakan	Sudah menggunakan	
4.	Proporsi besaran SILPA	Lebih atau sama dengan 30%	Kurang dari 30%	
5.	Penghitungan IKM untuk institusi pelayanan kesehatan	Tidak	Ya	
6.	Penghitungan IKM untuk institusi pelayanan investasi	Tidak	Ya	
7.	Penghitungan IKM untuk institusi pelayanan kependudukan	Tidak	Ya	
8.	Penghitungan IKM untuk institusi pelayanan publik lainnya	Tidak	Ya	
9.	Nilai mutu pelayanan berdasarkan rata-rata nilai IKM tahun 2022**	Mutu pelayanan B, C, atau D	Mutu pelayanan A	
10.	Penggunaan e-ASB (Analisis Standar Belanja)	Belum menggunakan	Sudah menggunakan	
Jumlah Skor				

Catatan: *) Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2023

**) Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



❖ Kriteria Pencapaian (40%)

Nilai 7

7. Transparansi dan Akuntabilitas

Bobot 5,00%

No	Item Penilaian	Kategori Skor Per Item		Skor
		0	1	
A. Transparansi				
1.	Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)	Tidak ada	Ada	
2.	OPD yang melapor kepada PPID	Tidak ada	Ada	
3.	Tingkat laporan OPD kepada PPID	OPD yang melapor kepada PPID kurang dari 50%	OPD yang melapor kepada PPID minimal 50%	
4.	Keberadaan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Tidak ada	Ada	
5.	Penggunaan e-planning	Belum menggunakan	Sudah menggunakan dengan tagging Prioritas Nasional (PN)	
6.	Tersedianya informasi APBD hingga ke level kegiatan secara online	Belum tersedia	Sudah tersedia	
B. Akuntabilitas				
1.	Opini BPK atas laporan keuangan daerah pada tahun terakhir	Disclaimer atau WDP	WTP	
2.	Hasil penilaian pada tahun terakhir	Selain A dan AA	A dan AA	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai	0	1,25	2,5	3,75	5	6,25	7,5	8,75	10



Penilaian Kualitatif Aspek Pencapaian Pembangunan

Rekomendasi terhadap Aspek Pencapaian Pembangunan

Keunggulan Daerah pada Aspek Pencapaian Pembangunan



❖ Kriteria Keterkaitan (5%)

Nilai 8

8. Tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2023 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD/RPD

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Visi - misi dan/atau tujuan - sasaran pembangunan bersumber dari RPJMD/RPD	Visi - misi dan/atau tujuan - sasaran pembangunan tidak sama dengan RPJMD/RPD	Visi - misi dan/atau tujuan - sasaran pembangunan sama dengan RPJMD/RPD	
2.	Tema RKPD 2023 bersumber dari arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2023	Tema RKPD 2023 tidak sesuai dengan arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2023	Tema RKPD 2023 sesuai dengan arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2023	
3.	Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 dengan arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2023	Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 tidak mendukung arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2023	Ada prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 yang mendukung arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2023	
4.	Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 dengan arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2023	Tidak seluruh prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 mendukung arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2023	Seluruh prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 mendukung arah kebijakan RPJMD/RPD untuk tahun 2023	
Jumlah Skor				

Catatan:

- 1) Untuk daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2022 (memiliki RPJMD yang berakhir pada 2022) mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
- 2) Untuk daerah yang belum memiliki RPJMD/RPD mengacu pada RPJPD atau dokumen transisi

Panduan pemberian nilai

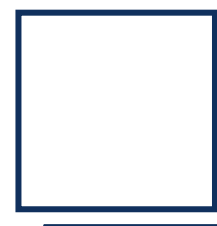
Jumlah Skor	0	1	2	3	4
Nilai	0	2,5	5	7,5	10



❖ Kriteria Keterkaitan (5%)

9. Tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2023

Bobot 2,50%



No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD 2023 dengan sasaran PN RKP 2023	Tidak ada keterkaitan	Adanya keterkaitan sasaran pembangunan RKPD dengan sasaran PN RKP 2023	
2.	Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD 2023 dengan sasaran PN RKP 2023	Kurang dari 50% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran PN RKP 2023	Minimal 50% sasaran pembangunan daerah sesuai dengan sasaran PN RKP 2023	
3.	Tersedianya tabel persandingan antara sasaran pembangunan daerah RKPD 2023 dengan sasaran PN RKP 2023	Tidak ada	Ada	
4.	Keselaran prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 dengan PN RKP 2023	Tidak ada keselaran	Adanya keselaran prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP 2023	
5.	Tingkat keselaran prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP 2023	Kurang dari 50% prioritas program RKPD selaras dengan PN RKP 2023	Minimal 50% prioritas program RKPD selaras dengan PN RKP 2023	
6.	Tersedianya tabel persandingan antara PN RKP 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah 2023	Tidak ada dan/atau tidak sesuai	Ada dan sesuai	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6
Nilai	0	1,7	3,3	5	6,7	8,3	10



❖ Kriteria Konsistensi (11,25%)

10. Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2021 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2023

Nilai 10

Bobot 3,75%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Kelengkapan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021	Evaluasi dilakukan tidak untuk seluruh urusan wajib	Evaluasi dilakukan untuk seluruh urusan wajib	
2.	Data pendukung evaluasi pelaksanaan RKPD 2021	Kurang dari 50% data pendukung merupakan capaian tahun 2021 atau 2022	Minimal 50% data pendukung merupakan capaian tahun 2021 atau 2022	
3.	Keterkaitan permasalahan pembangunan dengan hasil evaluasi Cat: evaluasi dilengkapi dengan data pendukung	Tidak seluruh permasalahan hasil evaluasi menjadi permasalahan pembangunan	Seluruh permasalahan hasil evaluasi menjadi permasalahan pembangunan	
4.	Ketersediaan isu strategis Cat: isu strategis tertulis secara eksplisit	Tidak ada isu strategis	Ada isu strategis	
5.	Kedalaman penjelasan tentang isu strategis Cat: sumber perumusan isu strategis: 1) Permasalahan pembangunan dalam RPJMD 2) Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD 3) Arah kebijakan RPJMD/RPD, dan 4) Arah kebijakan RKP	Sumber perumusan isu strategis kurang dari dua	Minimal ada dua sumber perumusan isu strategis	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5
Nilai	0	2	4	6	8	10



❖ Kriteria Konsistensi (11,25%)

11. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2023

Bobot 2,50%

Nilai 11

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan	Tidak ada prioritas pembangunan daerah yang berdasarkan permasalahan pembangunan	Ada prioritas pembangunan daerah yang berdasarkan permasalahan pembangunan	
2.	Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis	Tidak semua isu strategis menjadi prioritas pembangunan daerah	Semua isu strategis menjadi prioritas pembangunan daerah	
3.	Prioritas pembangunan daerah memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD dan/ atau janji tahunan Kepala Daerah	Tidak memuat sama sekali	Minimal ada satu yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3
Nilai	0	3,3	6,7	10



❖ Kriteria Konsistensi (11,25%)

12. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 dengan program prioritas daerah

Bobot 2,50%

Nilai 12

No	Item Penilaian	Kategori Skor Per Item		Skor
		0	1	
1.	Prioritas pembangunan daerah dijabarkan menjadi program prioritas	Tidak ada	Ada	
2.	Tersedianya penanggungjawab (OPD) untuk masing - masing program prioritas	Tidak ada	Ada	
3.	Tersedianya indikator sasaran untuk prioritas pembangunan daerah	Tidak ada	Ada	
4.	Keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas	Tidak ada	Ada	
5.	Tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas	Tidak semua indikator kinerja program terkait dengan indikator sasaran prioritas pembangunan	Semua indikator kinerja program terkait dengan indikator sasaran prioritas pembangunan	
Jumlah Skor				

Program Prioritas merupakan penjabaran dari prioritas daerah

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5
Nilai	0	2	4	6	8	10



❖ Kriteria Konsistensi (11,25%)

Nilai 13

13. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2023 dengan pagu anggaran

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor Per Item		Skor
		0	1	
1.	Tersedianya total pagu anggaran untuk prioritas pembangunan daerah	Tidak ada pagu anggaran prioritas pembangunan	Ada pagu anggaran prioritas pembangunan	
2.	Pagu anggaran prioritas pembangunan daerah dijabarkan untuk setiap prioritas pembangunan daerah	Tidak ada pagu anggaran	Ada pagu anggaran	
3.	Pagu anggaran prioritas pembangunan daerah dijabarkan untuk setiap program prioritas	Tidak ada pagu anggaran	Ada pagu anggaran	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3
Nilai	0	3,3	6,7	10



❖ Kriteria Kelengkapan dan Kedalaman (23,75%)

Nilai 14

14. Tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor Per Item		Skor
		0	1	
1.	Kondisi eksisting kerangka ekonomi daerah yang meliputi: - Pertumbuhan Ekonomi - PDRB Sektor - Tingkat Pengangguran - Inflasi - Kemiskinan	Tidak ada kerangka ekonomi daerah	Minimal tersedia kondisi eksisting untuk 3 poin pertama	
2.	Proyeksi kerangka ekonomi daerah yang meliputi: - Pertumbuhan Ekonomi - PDRB Sektor - Tingkat Pengangguran - Inflasi - Kemiskinan	Tidak ada proyeksi kerangka ekonomi	Minimal tersedia proyeksi untuk 3 poin pertama	
3.	Arah kebijakan ekonomi daerah yang menjawab tantangan pembangunan ekonomi daerah	Tidak ada	Ada	
4.	Kerangka pendanaan dilengkapi dengan proyeksi keuangan	Tidak ada kerangka pendanaan yang dilengkapi proyeksi keuangan	Ada kerangka pendanaan dilengkapi proyeksi keuangan	
5.	Konsistensi rencana belanja daerah dengan total belanja seluruh perangkat daerah	Total rencana belanja daerah lebih kecil dari total belanja seluruh perangkat daerah	Total rencana belanja daerah lebih besar atau sama dengan total belanja seluruh perangkat daerah	
Jumlah Skor				

Catatan: Selisih pendapatan dengan belanja adalah dana bantuan sosial (asumsi)

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5
Nilai	0	2	4	6	8	10



❖ Kriteria Kelengkapan dan Kedalaman (23,75%)

Nilai 15

15. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2023

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
Dukungan Daerah terhadap Prioritas Nasional				
1	Tingkat dukungan program daerah terhadap 25% kegiatan prioritas pada PN Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 25% kegiatan prioritas PN Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 25% kegiatan prioritas PN Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2023	
2	Tingkat dukungan program daerah terhadap 50% kegiatan prioritas pada PN Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 50% kegiatan prioritas PN Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 50% kegiatan prioritas PN Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2023	
3	Tingkat dukungan program daerah terhadap 75% kegiatan prioritas pada PN Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 75% kegiatan prioritas PN Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 75% kegiatan prioritas PN Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2023	
4	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP 2023 dengan program daerah	Tidak Ada	Ada dan sesuai	
Kebijakan Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19				
5	Tersedianya kebijakan pemulihan ekonomi dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19	Tidak ada	Ada	



No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
6	Tersedianya informasi program/kegiatan terkait kebijakan pemulihan ekonomi dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19	Tidak ada	Ada	
7	Tersedianya informasi stakeholders terkait kebijakan pemulihan ekonomi dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19	Tidak ada	Ada	
8	Tersedianya informasi anggaran kebijakan pemulihan ekonomi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	Tidak ada	Ada	
Jumlah Skor				

Catatan:

1. Satu program daerah boleh mendukung beberapa PN. Kegiatan prioritas RKP 2023 tersedia di Lampiran 2
2. Identifikasi dukungan program harus disertai indikator program yang relevan yang mendukung kegiatan prioritas

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai	0	1,25	2,5	3,75	5	6,25	7,5	8,75	10



❖ Kriteria Kelengkapan dan Kedalaman (23,75%)

Nilai 16

16. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan prioritas pada PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2023

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 25% kegiatan prioritas pada PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 25% kegiatan prioritas PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 25% kegiatan prioritas PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2023	
2.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 50% kegiatan prioritas pada PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 50% kegiatan prioritas PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 50% kegiatan prioritas PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2023	
3.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 75% kegiatan prioritas pada PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 75% kegiatan prioritas PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 75% kegiatan prioritas PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan RKP 2023	
4.	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP 2023 dengan program daerah	Tidak Ada	Ada dan sesuai	
Jumlah Skor				

Catatan

1. Satu program daerah boleh mendukung beberapa PN. Kegiatan prioritas RKP 2023 tersedia di Lampiran 2
2. Identifikasi dukungan program harus disertai indikator program yang relevan yang mendukung kegiatan prioritas

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4
Nilai	0	2,5	5	7,5	10



❖ Kriteria Kelengkapan dan Kedalaman (23,75%)

Nilai 17

17. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan prioritas pada PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2023

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 25% kegiatan prioritas pada PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 25% kegiatan prioritas PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 25% kegiatan prioritas PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2023	
2.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 50% kegiatan prioritas pada PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 50% kegiatan prioritas PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 50% kegiatan prioritas PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2023	
3.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 75% kegiatan prioritas pada PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 75% kegiatan prioritas PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 75% kegiatan prioritas PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2023	
4.	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP 2023 dengan program daerah	Tidak Ada	Ada dan sesuai	
Jumlah Skor				

Catatan

1. Satu program daerah boleh mendukung beberapa PN. Kegiatan prioritas RKP 2023 tersedia di Lampiran 2
2. Identifikasi dukungan program harus disertai indikator program yang relevan yang mendukung kegiatan prioritas

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4
Nilai	0	2,5	5	7,5	10



❖ Kriteria Kelengkapan dan Kedalaman (23,75%)

Nilai 18

18. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan Prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2023

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 25% kegiatan prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 25% kegiatan prioritas PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2023	Program prioritas daerah mendukung minimal 25% kegiatan prioritas PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2023	
2.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 50% kegiatan prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 50% kegiatan prioritas PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2023	Program prioritas daerah mendukung minimal 50% kegiatan prioritas PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2023	
3.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 75% kegiatan prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 75% kegiatan prioritas PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2023	Program prioritas daerah mendukung minimal 75% kegiatan prioritas PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2023	
4.	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP 2023 dengan program daerah	Tidak Ada	Ada dan sesuai	
Jumlah Skor				

Catatan

1. Satu program daerah boleh mendukung beberapa PN. Kegiatan prioritas RKP 2023 tersedia di Lampiran 2
2. Identifikasi dukungan program harus disertai indikator program yang relevan yang mendukung kegiatan prioritas

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4
Nilai	0	2,5	5	7,5	10



❖ Kriteria Kelengkapan dan Kedalaman (23,75%)

Nilai 19

19. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan Prioritas pada PN Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2023

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 25% kegiatan prioritas pada PN Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 25% kegiatan prioritas PN Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 25% kegiatan prioritas PN Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2023	
2.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 50% kegiatan prioritas pada PN Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 50% kegiatan prioritas PN Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 50% kegiatan prioritas PN Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2023	
3.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 75% kegiatan prioritas pada PN Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 75% kegiatan prioritas PN Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 75% kegiatan prioritas PN Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2023	
4.	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP 2023 dengan program daerah	Tidak Ada	Ada dan sesuai	
Jumlah Skor				

Catatan

1. Satu program daerah boleh mendukung beberapa PN. Kegiatan prioritas RKP 2023 tersedia di Lampiran 2
2. Identifikasi dukungan program harus disertai indikator program yang relevan yang mendukung kegiatan prioritas

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4
Nilai	0	2,5	5	7,5	10



❖ Kriteria Kelengkapan dan Kedalaman (23,75%)

Nilai 20

20. Tersedianya dukungan program daerah RKPD 2023 terhadap kegiatan Prioritas pada PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2023

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 25% kegiatan prioritas pada PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 25% kegiatan prioritas PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 25% kegiatan prioritas PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2023	
2.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 50% kegiatan prioritas pada PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 50% kegiatan prioritas PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 50% kegiatan prioritas PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2023	
3.	Tingkat dukungan program daerah terhadap 75% kegiatan prioritas pada PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2023 sesuai dengan kewenangan daerah	Program daerah mendukung kurang dari 75% kegiatan prioritas PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2023	Program daerah mendukung minimal 75% kegiatan prioritas PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2023	
4.	Tersedianya informasi eksplisit persandingan keterkaitan Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP 2023 dengan program daerah	Tidak Ada	Ada dan sesuai	
Jumlah Skor				

Catatan

1. Satu program daerah boleh mendukung beberapa PN. Kegiatan prioritas RKP 2023 tersedia di Lampiran 2
2. Identifikasi dukungan program harus disertai indikator program yang relevan yang mendukung kegiatan prioritas

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4
Nilai	0	2,5	5	7,5	10



❖ Kriteria Kelengkapan dan Kedalaman (23,75%)

Nilai 21

21. Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPD 2023 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

Bobot 2,50%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Penerapan konsep tematik	Tidak ada prioritas pembangunan daerah	Ada prioritas pembangunan daerah	
2.	Tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir	Tidak ada perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir	Ada perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir	
3.	Penerapan konsep integratif terkait pelibatan OPD	Prioritas pembangunan daerah hanya melibatkan satu OPD	Prioritas pembangunan daerah melibatkan beberapa OPD	
4.	Penerapan konsep integratif terkait pelibatan stakeholders di luar OPD di daerah yang bersangkutan	Prioritas pembangunan daerah hanya melibatkan OPD di daerah bersangkutan	Prioritas pembangunan daerah melibatkan stakeholders di luar OPD di daerah bersangkutan	
5.	Penerapan konsep spasial terkait penjabaran prioritas pembangunan daerah	Prioritas pembangunan daerah tidak dijabarkan dalam satu kesatuan wilayah	Prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam satu kesatuan wilayah	
6.	Keruntutan penjelasan kebijakan pembangunan daerah RKPD 2023 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)	Tidak runtut	Runtut terintegrasi dalam penjelasan prioritas pembangunan daerah	
Jumlah Skor				

Catatan:

- **Tematik** adalah tema-tema yang menjadi prioritas dalam satu jangka waktu tertentu
- **Holistik** artinya penjabaran tematik dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan
- **Integratif** artinya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat dari berbagai peran pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan
- **Spasial** artinya kegiatan pembangunan yang direncanakan fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam kesatuan wilayah

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6
Nilai	0	1,7	3,3	5	6,7	8,3	10



❖ Kriteria Kelengkapan dan Kedalaman (23,75%)

Nilai 22

22. Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas

Bobot 3,75%

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah	Tidak ada indikator kinerja	Ada indikator kinerja sasaran	
2.	Penggunaan indikator dampak sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah	Tidak ada	Ada	
3.	Tersedianya indikator kinerja program prioritas daerah	Tidak seluruh program memiliki indikator kinerja	Seluruh program memiliki indikator kinerja	
4.	Penggunaan indikator hasil sebagai indikator kinerja program prioritas daerah	Tidak ada	Ada	
5.	Tingkat penggunaan indikator hasil sebagai indikator kinerja program prioritas daerah	Tidak semua indikator kinerja bersifat indikator hasil	Semua indikator kinerja bersifat indikator hasil	
Jumlah Skor				

Catatan: Referensi indikator dampak dan hasil bersumber dari Permendagri No. 86 Tahun 2017

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5
Nilai	0	2	4	6	8	10



Penilaian Kualitatif Aspek Kualitas Dokumen RKPD

Keunggulan Daerah pada Aspek Kualitas Dokumen RKPD

Rekomendasi terhadap Aspek Kualitas Dokumen RKPD



❖ Kriteria Inovasi (20%)

23. Indikator kelengkapan dokumen Inovasi daerah

Nilai 23

Bobot 5,00%

Syarat inovasi yang dinilai:

1. Sesuai dengan tema RKP 2023 (Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan)
2. Dilakukan pada kurun waktu 2020 – 2023

Nama Inovasi yang dinilai: _____

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Penjelasan tentang keterkaitan inovasi dengan tema RKP 2023	Tidak ada	Ada	
2.	Penjelasan tentang kerangka logis yang mendukung inovasi	Tidak ada	Ada	
3.	Penjelasan tentang unsur kebaruan inovasi	Tidak ada	Ada	
4.	Penjelasan tentang input anggaran inovasi	Tidak ada	Ada	
5.	Penjelasan tentang input sumberdaya manusia inovasi	Tidak ada	Ada	
6.	Penjelasan tentang kerangka tahapan pelaksanaan inovasi	Tidak ada	Ada	
7.	Penjelasan tentang proses inovasi	Tidak ada	Ada	
8.	Penjelasan tentang output inovasi	Tidak ada	Ada	
9.	Penjelasan tentang outcome inovasi	Tidak ada	Ada	
10.	Stakeholders yang terlibat	Tidak ada	Ada	
11.	Pemantauan dan evaluasi	Tidak ada	Ada	
12.	Permasalahan pelaksanaan dan tindak lanjut	Tidak ada	Ada	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nilai	0	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2	5	5,8	6,7	7,5	8,3	9,2	10



❖ Kriteria Inovasi (20%)

Nilai 24

24. Indikator kedalaman inovasi daerah

Bobot 15,00%

Syarat inovasi yang dinilai:

1. Sesuai dengan tema RKP 2023 (Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan)
2. Dilakukan pada kurun waktu 2020 – 2023

Nama Inovasi yang dinilai: _____

No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
1.	Kelengkapan komponen penyusun kerangka logis	Lemah	Kuat	
2.	Keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang dilaksanakan	Lemah	Kuat	
3.	Keterkaitan penjelasan output dengan outcome	Lemah	Kuat	
4.	Kesesuaian indikator output dengan output inovasi	Tidak sesuai	Sesuai	
5.	Kesesuaian indikator outcome dengan output inovasi	Tidak sesuai	Sesuai	
6.	Output inovasi	Belum ada / tidak ada penjelasan	Ada	
7.	Outcome inovasi	Belum ada / tidak ada penjelasan	Ada	
8.	Jenis kebaruan inovasi terkait (lingkup nasional)	Modifikasi/ Replikasi	Benar-benar baru	
9.	Fase inovasi	Fase rencana	Sudah dilaksanakan	
10.	Lingkup penerima manfaat inovasi	Sebagian wilayah	Seluruh wilayah	
11.	Dukungan regulasi terhadap inovasi terkait	Tidak ada	Ada	
12.	Bentuk dukungan regulasi terhadap inovasi terkait	Perkada, peraturan dinas, dll	Perda	



No	Item Penilaian	Kategori Skor per Item		Skor
		0	1	
13.	Keterkaitan inovasi dengan tema RKP 2023 "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Lemah	Kuat	
14.	Informasi monitoring dan evaluasi (internal OPD, stakeholders pelaksana, dan pengguna)	Tidak ada	Ada	
Jumlah Skor				

Panduan pemberian nilai

Jumlah Skor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nilai	0	0,71	1,43	2,14	2,86	3,57	4,29	5	5,71	6,43	7,14	7,86	8,57	9,29	10



Penilaian Kualitatif Aspek Inovasi

Keunggulan Daerah pada Aspek Inovasi

Rekomendasi terhadap Aspek Inovasi



Lembar Pernyataan

Bersama ini saya menyatakan bahwa penilaian ini dilakukan secara profesional, jujur, bertanggung-jawab, dan tidak atas dasar tekanan dari pihak mana pun.

Demikian pernyataan ini.

Saya yang menyatakan:

Nama Lengkap Penilai

Tanda Tangan Penilai

Lembar ini ditandatangani oleh TPT PPD 2023



Lembar Penerimaan

Bersama ini saya menyatakan telah menerima hasil penilaian ini secara profesional, jujur, bertanggung-jawab, dan tidak atas dasar tekanan dari pihak mana pun.

Demikian pernyataan ini.

Saya yang menerima:

Nama Lengkap Penerima

Tanda Tangan Penerima

Lembar ini ditandatangani oleh Sekretariat PPD 2023



Lampiran 1

Urusan Wajib Pemerintah dan Kriteria Kewenangannya

No	Urusan Wajib Pemerintah (UU 23/2014 dan Permendagri 86/2017)
1.	Pendidikan
2.	Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6.	Sosial
7.	Tenaga Kerja
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Pangan
10.	Pertanahan
11.	Lingkungan Hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15.	Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika
17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
18.	Penanaman Modal
19.	Kepemudaan dan Olahraga
20.	Statistik
21.	Persandian
22.	Kebudayaan
23.	Perpustakaan
24.	Kearsipan

KRITERIA KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAH			
No	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1.	Lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara	Lokasinya lintas daerah kabupaten/kota	Lokasinya dalam daerah kabupaten/kota
2.	Penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara	Penggunanya lintas daerah kabupaten/kota	Penggunanya dalam daerah kabupaten/kota
3.	Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara	Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota
4.	Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat	Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi	Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota
5.	Peranannya strategis bagi kepentingan nasional		



❖ Prioritas Pembangunan Nasional RKP 2023

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	No	Kegiatan Prioritas 2023
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1	Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan
			2	Peningkatan pasokan bahan bakar nabati
			3	Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi
			4	Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik
			5	Pengembangan Industri Pendukung EBT
		Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	6	Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)
			7	Pengelolaan hutan berkelanjutan
			8	Penyediaan air untuk pertanian
			9	Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas
			10	Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau
			11	Pengembangan waduk multiguna
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	12	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan
			13	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok
			14	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar
			15	Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian
			16	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional
		Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	17	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
			18	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya
			19	Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta <i>database</i> kelautan dan perikanan
		Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi	20	Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar
			21	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha
			22	Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi
			23	Peningkatan penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha
			24	Peningkatan nilai tambah usaha sosial



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	No	Kegiatan Prioritas 2023
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	25	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir
			26	Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam termasuk melalui pengembangan smelter, kawasan industri terutama di luar Jawa
			27	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok
			28	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital
			29	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan
			30	Pengembangan industri halal
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	31	Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa
			32	Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor
			33	Pengelolaan impor
			34	Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif
			35	Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global
			36	Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi <i>branding</i> , dan produk kreatif
		Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	37	Peningkatan pendalaman sektor keuangan
			38	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0
			39	Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga
			40	Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata
			41	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital
2	Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan wilayah Sumatera	1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (<i>khusus penilaian provinsi dan kota</i>)
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (<i>khusus penilaian provinsi dan kabupaten</i>)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah
		Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	No	Kegiatan Prioritas 2023
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah
		Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah
		Pembangunan Wilayah Kalimantan	1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah
		Pembangunan Wilayah Sulawesi	1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah
		Pembangunan Wilayah Maluku	1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah
		Pembangunan Wilayah Papua	1	Pengembangan Kawasan strategis
			2	Pengembangan sektor unggulan
			3	Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)
			4	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)
			5	Kelembagaan dan keuangan daerah



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	No	Kegiatan Prioritas 2023
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	1	Percepatan cakupan administrasi kependudukan
			2	Integrasi sistem administrasi kependudukan
			3	Pendampingan dan layanan terpadu
			4	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	5	Sistem jaminan sosial nasional
			6	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran
			7	Perlindungan sosial adaptif
			8	Kesejahteraan sosial
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	9	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi
			10	Percepatan perbaikan gizi masyarakat
			11	Peningkatan pengendalian penyakit
			12	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
			13	Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
		Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas	14	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
			15	Afirmasi akses dan percepatan wajib belajar 12 tahun
			16	Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan
			17	Penjaminan mutu Pendidikan
			18	Peningkatan tata kelola pendidikan
		Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	19	Pemenuhan hak dan perlindungan anak
			20	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan
			21	Kualitas pemuda
		Pengentasan kemiskinan	22	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga
			23	Keperantaraan usaha dan dampak sosial
			24	Reformasi agraria
			25	Perhutanan sosial
		Peningkatan produktivitas dan daya saing	26	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri
			27	Prestasi Olahraga
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkuat ketahanan sbudaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	1	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti
			2	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif
			3	Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter
			4	Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan pancasila



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	No	Kegiatan Prioritas 2023
		Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	5	Pembinaan ideologi pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme
			6	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal
			7	Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat
			8	Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
			9	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan
		Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	10	Peningkatan budaya literasi
			11	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra
			12	Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta
			13	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi
5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur pelayanan dasar	1	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
			2	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
			3	Keselamatan dan keamanan transportasi
			4	Waduk <i>multipurpose</i> dan modernisasi irigasi
		Infrastruktur ekonomi	5	Konektivitas jalan
			6	Konektivitas Laut
			7	Konektivitas Udara
			8	Konektivitas darat
		Infrastruktur perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)	9	Transportasi perkotaan
			10	Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan
			11	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan
			12	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan
		Energi dan ketenagalistrikan (khusus penilaian provinsi)	13	Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan
			14	Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan
			15	Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik
		Transformasi digital	16	Penuntasan infrastruktur TIK
			17	Pemanfaatan infrastruktur TIK
			18	Fasilitas pendukung transformasi digital



No	Prioritas Nasional	Program Prioritas	No	Kegiatan Prioritas 2023
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
			2	Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
			3	Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
			4	Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
		Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	5	Penanggulangan bencana
			6	Peningkatan ketahanan iklim
		Pembangunan rendah karbon	7	Pembangunan energi berkelanjutan
			8	Pemulihan lahan berkelanjutan
			9	Pengelolaan limbah
			10	Pengembangan industri hijau
			11	Rendah karbon pesisir dan laut



"Halaman ini sengaja dikosongkan"





Penghargaan
Pembangunan
Daerah 2023



**Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan Daerah**

Gedung Bappenas Lantai 9
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 12920



Phone
(021) 50927413



Email & Online
Email: dit.peppd@bappenas.go.id



[dit.peppdbappenas](https://www.instagram.com/dit.peppdbappenas)



Direktorat PEPPD



peppd.bappenas.go.id